



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
KECAMATAN KOKALUKUNA



2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan

-LAKIP-

Kata pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LAKIP Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Baubau, Januari 2024
Camat Kokalukuna

MUSLIDIN, S.Sos
NIP. 19701003 199203 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kokalukuna meningkat

Indikator sasaran: Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kokalukuna

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau ke depan, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelurahan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, seni budaya dan pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Permasalahan lingkungan sebagai akibat dinamisasi perkembangan perkotaan
3. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat
4. Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Dasar Hukum.....	7
1.3. Tugas dan Fungsi.....	8
1.4. Aspek Strategis.....	13
1.5. Kekuatan Sumber Daya Manusia	14
1.6. Sarana dan Prasarana.....	15
1.7. Keuangan.....	15
1.8. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis.....	17
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	17
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
3.1.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	22
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra Kecamatan Kokalukuna	22
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	23
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	24
3.2 Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP	
Lampiran-Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Karyawan Kecamatan Kokalukuna.....	14
Tabel 1. 2 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 1. 3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Eselon.....	14
Tabel 1. 4 Data PNS Kelurahan.....	14
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kokalukuna	15
Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Baubau 2018-2023	17
Tabel 2. 3 Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir	18
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023	19
Tabel 2. 6 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Tahun 2023	19
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	22
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023.....	22
Tabel 3. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	23
Tabel 3. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
Tabel 3. 7 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	24
Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program/Kegiatan Tahun 2023	26

Daftar Gambar



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kokalukuna9

BAB I BERISI :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Tugas dan Fungsi
4. Aspek Strategis
5. Kekuatan Sumber Daya Manusia
6. Srana dan Prasana
7. Keuangan
8. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau
2. Mendorong Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat menuju “TERWUJUDNYA BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA” dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (Clean Government) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Kokalukuna telah melaksanakannya yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Baubau No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota baubau Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau.

1.3.Tugas dan Fungsi

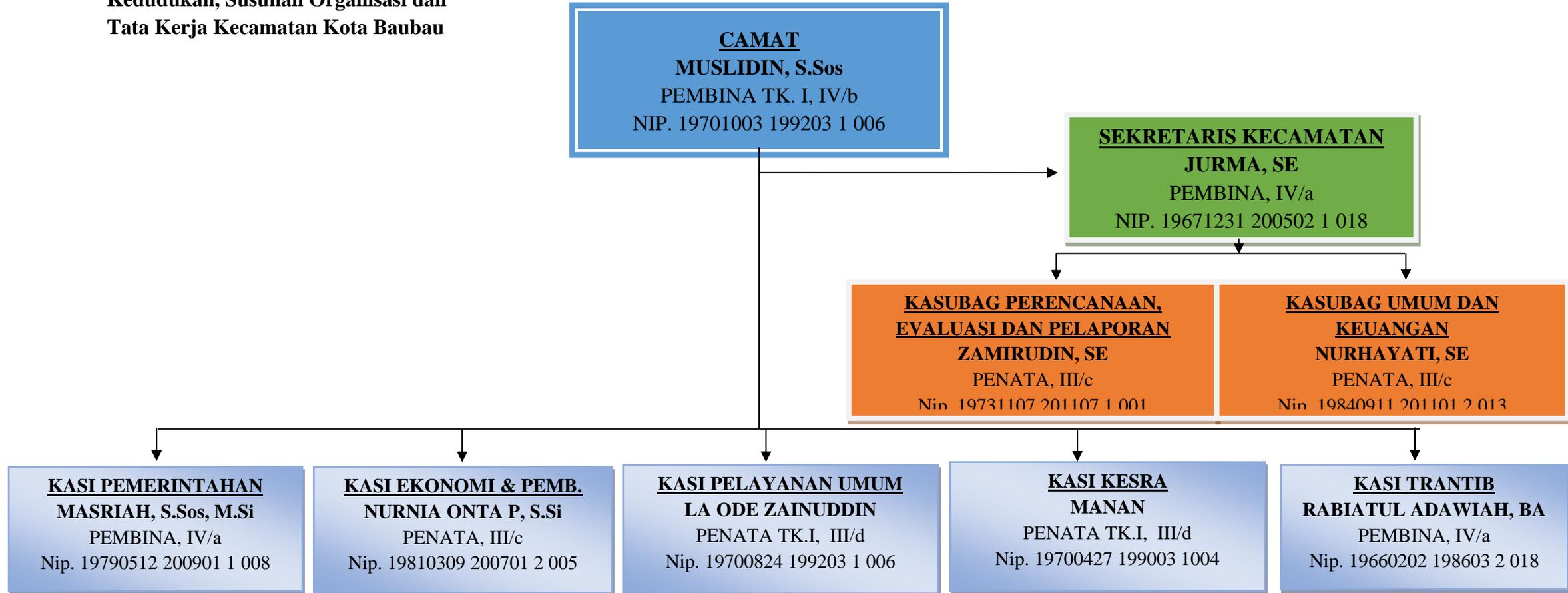
Dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tentang Susunan organisasi Kecamatan Kokalukuna sebagai berikut :

1. Susunan organisasi :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Pelayanan Umum

Dari uraian susunan organisasi kecamatan diatas maka dapat dilihat pada Gambar Struktur organisasi Kecamatan Kokalukuna sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN KOKALUKUNA

Dasar : Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 66 Tahun 2021
tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan Kota Baubau



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kokalukuna

Uraian Tugas Jabatan Struktural dan jabatan Fungsional Umum adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Walikota di Kecamatan. Tugas Kecamatan adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas pokok dan fungsi kecamatan Kokalukuna dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Camat

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Ayat (1) : Camat mempunyai tugas dan pokok membantu Walikota dalam Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- b. Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :
 1. Penyelenggaraan kewenangan wajib kota dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh walikota;
 2. Penyelenggarakan tugas pemerintahan Umum, pelayanan umum, ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman dan ketertiban.
 3. Pembinaan Administrasi Kelurahan;
 4. Penyelenggaraan Perencanaan Program Pembangunan dan Perekonomian;
 5. Pengkoordinasian kegiatan unit pelaksana teknis (UPT) diwilayah kerjanya;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait diwilayah kerjanya;
 7. Penyusunan program ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Ayat (3) : Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 1. Perizinan
 2. Rekomendasi;
 3. Koordinasi;
 4. Pembinaan;
 5. Pengawasan;
 6. Fasilitasi;
 7. Penetapan;
 8. Penyelenggaraan; dan
 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- d. Ayat (4) : Jenis kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ayat (1) : Sekretariat mempunyai tugas pokok pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- b. Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. Pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas;
 2. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
 3. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Pelaksanaan urusan umum, persuratan dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta humas dan protocol;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ayat (1) : Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrarian dan pembinaan pemerintahan kelurahan.
- b. Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta pembinaan politik dalam negeri;
 2. Pelaksanaan urusan wajib daerah dan urusan lain tingkat kecamatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan di kelurahan;
 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
 5. Pelaksanaan tugas pembantuan;
 6. Melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta pembinaan politik dalam negeri;

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengumpulkan dan menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis perencanaan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas jalannya pembangunan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan dibidang perekonomian yang meliputi pembinaan produksi distribusi dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

- c. Penyusunan rencana bagi pelaksanaan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. Pengumpulan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan serta pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Penyusunan rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam mengumpulkan dan menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melakukan penyusunan rencana dan program serta kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, mental spiritual dan kegiatan urusan kesejahteraan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- c. Pelaksanaan penanggulangan pencegahan bencana alam di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan masalah sosial;
- e. Pengumpulan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- g. Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Ketentraman dan ketertiban

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ayat (1) : Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - 1. Penyiapan pedoman petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - 2. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - 3. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan dalam wilayah kecamatan;
 - 4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - 5. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Seksi Pelayanan Umum
Mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Ayat (1) : Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan Pelayanan Umum
 - b. Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :
 1. Mengumpulkan data dan bahan lingkup pelayanan umum;
 2. Pelayanan data dan informasi kecamatan;
 3. Pembinaan pelayanan kebersihan, pertamanan dan sanitasi;
 4. Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
 1. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum;
 2. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;

Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan di wilayah masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- f. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

1.4. Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon aspek strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum aspek strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Aspek Strategis yang melingkupi Kecamatan Kotalukuna Kota Baubau, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelurahan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, seni budaya dan pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Permasalahan lingkungan sebagai akibat dinamisasi perkembangan perkotaan
3. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat
4. Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 .

1.5. Kekuatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kokalukuna didukung oleh 50 orang karyawan yang terdiri atas 50 orang Pegawai Negeri Sipil.

Adapun komposisi karyawan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Karyawan Kecamatan Kokalukuna

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris kecamatan	1	-	-	-	-	1	1
3	Kasi kecamatan	4	1	-	-	4	1	5
4	Kasubag	2	-	-	-	2	-	2
5	JFU kecamatan	4	-	-	2	2	-	4
6	Lurah	6	0	-	-	6	-	6
7	Sekretaris kelurahan	3	1	-	-	4	-	4
8	Kasi Kelurahan	6	8	-	-	14	-	14
9	JFU kelurahan	2	9	-	7	4	-	11
	Jumlah	27	23	-	9	37	4	50

Tabel 1. 2 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	1	-	1
2	D IV/ S1	33	18	15
4	D II	1	1	-
5	SLTA	15	7	8
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
	Jumlah	50	25	24

Tabel 1. 3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	11	8	3
4	IV B	10	5	5

Tabel 1. 4 Data PNS Kelurahan

No	Kelurahan	Usia			Pendidikan				Jumlah
		30-40	40-50	50-58	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Kadolo	2	2	2	-	-	6	-	6
2	Kadolomoko	2	3	3	3	-	5	-	8
3	Lakologou	2	2	2	3	-	3	-	6
4	Waruruma	1	2	2	1	1	3	-	5
5	Sukanayo	-	4	-	1	-	3	-	4
6	Liwuto	-	6	-	2	-	4	-	6

No	Kelurahan	Usia			Pendidikan				Jumlah
		30-40	40-50	50-58	SMA	Diploma	S1	S2	
	Jumlah	7	19	9	10	1	24	0	35

1.6.Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Kokalukuna didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Kecamatan Kokalukuna mempunyai kendaraan roda 2 sebanyak 9 buah. Dan untuk mendukung kelancaran kinerja berikut ini disajikan sarana prasarana yang tersedia di Kecamatan Kokalukuna beserta kondisinya.

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kokalukuna

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	-	-
2	Motor	2 unit	Baik
3	Meja Kerja	15 buah	Baik
4	Kursi Kerja	15 buah	Baik
5	Kursi Tamu	-	-
6	Sofa	2 buah	Baik
7	Lemari Arsip	6 buah	Baik
8	PC	3 buah	Baik
9	Laptop	8 unit	Baik
10	Printer	6 unit	Baik
11	AC	7 unit	Baik
12	Kipas Angin	-	-
13	Kulkas	1	Baik
14	Proyektor	1	Baik

1.7.Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Baubau. Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.844.733.886,- dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 5.902.670.651,-, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 35.266.840,-, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp 1.878.118.719 dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 28.859.730,-.

1.8.Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Kota Baubau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, dasar Hukum, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, Aspek strategis, Kekuatan Sumber Daya Manusia , sarana dan prasarana , keuangan dan Sistematika Penyajian LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II BERISI :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Rencana Kinerja Tahunan (RLT) 2021*
3. *Perjanjian Kinerja Tahun 2021*
4. *Program dan Kegiatan Tahun 2021*

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Baubau yang tertuang dalam RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2013-2018).

RPJMD Pemerintah Kota Baubau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Kota Baubau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Baubau No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Baubau 2018-2023 sebagai berikut,

Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Baubau 2018-2023

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Mewujudkan Kota Baubau Yang Maju Sejahtera dan Berbudaya Tahun 2018 – 2023	1. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Tertib	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
		2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
		3. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas
	2. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Aman	4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat yang beragama
	3. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Maju	5. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat
		6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
		7. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
		8. Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		9. Meningkatkan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Masyarakat
	4. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Populer	10. Meningkatkan investasi daerah
		11. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan masyarakat
		12. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri, perdagangan dan jasa
		13. Meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata
		14. Meningkatkan pengelolaan budaya lokal daerah
		15. Meningkatkan kualitas daya saing komoditas unggulan daerah
5.	16. Meningkatkan infrastruktur pemukiman masyarakat Kota Baubau	

Visi	Misi		Sasaran Daerah	
		Mewujudkan Baubau sebagai Kota Indah	17.	Meningkatnya Pembangunan yang berwawasan lingkungan
	6.	Mewujudkan Baubau sebagai Kota Lancar	18.	Meningkatnya kelancaran aksesibilitas laut, darat dan komunikasi

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Kokalukuna mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada sasaran:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau selama 5 tahun anggaran adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan adalah Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan dan sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Kokalukuna Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
			Rata-rata waktu Pelayanan	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	7 Menit

Tabel 2. 2 Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET AKHIR (2023)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kewilayahan yang berkualitas	Peningkatan Partisipasi kelembagaan sosial masyarakat	Kelurahan	Tinggi	Tinggi
		Persentase Pelayanan Masyarakat Tingkat Pemerintah Kelurahan sesuai standar pelayanan.	%	75	80
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	70	75
		Pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat	-	Sudah ada	Sudah ada
2.		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	Baik	Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET AKHIR (2023)
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Rata-rata waktu Pelayanan	Menit	10	7

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1. Strategi

Sejalan dengan Visi dan Misi kepala daerah hal yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, yaitu Pemantapan Reformasi Birokrasi

2. Kebijakan

Peningkatan pelayanan publik dengan dukungan system komputerisasi dan teknologi tepat guna.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kecamatan	Baik (2,51-3,25)
		Rata-rata waktu Pelayanan di Kecamatan	7 Menit

Tabel 2. 4 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1.	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Usrusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Perbandingan Target Dan Realisasi
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	Sangat Baik	Sangat Baik	100
		Rata-rata Waktu Pelayanan	menit	7 menit	6,51 menit	100

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 2 (dua) indikator. Pada tahun 2023, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 %.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		Rata-rata Waktu Pelayanan	menit	10 menit	10 menit	7 menit	10 menit	9,47 menit	6,51 menit

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya target kinerja selalu tercapai.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra Kecamatan Kokalukuna

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		TARGET AKHIR RENSTRA – 2023	CAPAIAN s/d 2023 TERHADAP TARGET 2023
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Rata-rata Waktu Pelayanan	7 menit	7 menit	6,51 menit	6,51 menit

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya pencapaian antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan kokalukuna Kota Baubau Tahun 2023.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	-	-
	Rata-rata Waktu Pelayanan	7 menit	6,51 menit	Adanya perbaikan waktu pelayanan setiap pelayanan yang diberikan	-	-

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Rata-rata Waktu Pelayanan	7 menit	6,51 menit	7 menit

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan pemanfaatan seluruh unsur yang ada di Kecamatan Kokalukuna.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3. 7 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Program / Kegiatan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	54 Orang	97
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Orang	31 Orang	100
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
17	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54 Orang	54 Orang	100
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Perlengkapannya	60 Orang	60 Orang	100
19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100
20	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Laporan	2 Laporan	100
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	3 Orang	100
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	90,86
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Jenis	60 Jenis	99,75
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91000 Lembar	91000 Lembar	97,5
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Media	2 Media	100

No.	Program / Kegiatan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	640 Orang	640 Orang	100
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Orang	25 Orang	100
28	Pengadaan Mebel	12 set	12 Set	100
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	19 Unit	100
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Lembar	450 lembar	100
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264 Rekening	264 Rekening	94
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Set	2 Set	100
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 orang	9 Orang	100
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	3 unit	100
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	14 unit	100
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 unit	7 unit	100
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40 Orang	40 Orang	100
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100
5	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Lembaga	5 Lembaga	100
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kadolomoko	40 Orang	40 Orang	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadolomoko	1 Paket	1 Paket	65,33
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadolomoko	5 Lembaga	5 Lembaga	100
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lakologou	40 Orang	40 Orang	100
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lakologou	1 Paket	1 Paket	49
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lakologou	5 Lembaga	5 Lembaga	100
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Waruruma	40 Orang	40 Orang	100
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Waruruma	1 Paket	1 Paket	100
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Waruruma	5 Lembaga	5 Lembaga	100
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kadolo	40 Orang	40 Orang	100
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadolo	1 Paket	1 Paket	98,5
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadolo	5 Lembaga	5 Lembaga	100
13	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukanayo	40 Orang	40 Orang	100
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanayo	1 Paket	1 Paket	98
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sukanayo	5 Lembaga	5 Lembaga	99,7

No.	Program / Kegiatan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Liwuto	40 Orang	40 Orang	100
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Liwuto	1 Paket	1 Paket	98,5
18	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Liwuto	5 Lembaga	5 Lembaga	87,7
IV	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	50 Orang	50 Orang	100

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 97,50 % dari total anggaran yang dialokasikan. Total Anggaran Kecamatan Kokalukuna sebesar Rp. 7.884.733.886,- terdiri dari anggaran kecamatan sebesar Rp. 6.006.615.167,- dan dana 6 kelurahan Rp 1.878.118.719,-. Rincian realisasi anggaran yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 95%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 95% dan Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerntahan Umum sebesar 100%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program/Kegiatan Tahun 2023

N o.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.088.600	33.005.600	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.459.070	4.256.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.509.160	4.508.100	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.527.898	5.520.800	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.897.921	3.880.800	99,8
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.221.400	5.220.400	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.085.140	12.085.100	100
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.556.534.000	4.409.360.059	97
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.350.000	218.750.000	100
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.431.248	13.415.200	100
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.076.630	7.076.600	100
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.502.960	23.502.900	100
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.636.870	6.636.800	100

15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.636.750	6.636.700	100
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.621.060	28.621.000	100
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	62.410.000	62.410.000	100
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.838.500	2.838.500	100
19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.577.530	3.577.500	100
20	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.571.080	10.542.500	100
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.300.000	25.300.000	100
23	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	62.044.650	62.015.800	100
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.767.300	40.767.300	100
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	100
26	Fasilitasi Kujungan Tamu	146.388.000	146.388.000	100
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.268.000	250.112.500	100
28	Pengadaan Mebel	-	-	-
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	43.992.630	100
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.160.000	8.160.000	100
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.014.830	76.076.684	94
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.000.000	47.000.000	100
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.600.000	64.200.000	96,4
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.520.000	35.434.000	99,8
35	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	9.500.000	100
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.750.000	72.750.000	100
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.104.570	21.104.500	100
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.180.370	4.180.300	100
3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.481.230	6.481.200	100
4	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.500.670	3.500.600	100
5	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	59.768.740	59.768.700	100
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kadolomoko	14.331.540	14.331.500	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadolomoko	67.722.500	65.172.500	96
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadolomoko	204.016.760	204.016.700	100
4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.052.070	7.052.000	100
5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.895.530	7.895.500	100
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lakologou	14.331.540	14.331.500	100
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lakologou	101.114.720	82.564.720	82
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lakologou	173.356.310	173.351.800	100

9	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.052.070	7.052.000	100
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.895.530	7.895.500	100
11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Waruruma	14.331.540	14.331.500	100
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Waruruma	84.475.000	84.475.000	100
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Waruruma	201.883.499	201.862.750	100
14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.052.070	7.052.070	100
15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.913.530	7.913.530	100
16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kadolo	14.331.540	14.331.500	100
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadolo	83.219.000	81.169.000	98
18	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadolo	205.194.850	205.191.900	100
19	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.052.070	7.052.000	100
20	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.916.930	7.916.900	100
21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukanayo	14.331.540	14.239.500	100
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanayo	65.807.100	64.257.100	98
23	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sukanayo	192.609.280	191.816.500	100
24	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.052.070	7.052.070	100
25	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.895.530	7.913.530	100
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Liwuto	14.331.540	14.331.500	100
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Liwuto	93.219.000	91.169.000	98
28	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Liwuto	170.017.720	157.993.200	93
29	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.052.070	7.052.070	100
30	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.895.530	7.913.530	100
IV	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	28.859.730	28.856.700	100
Jumlah Realisasi Belanja Langsung		7.844.733.886	7.679.524543	97,51

Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, realisasi tertinggi yaitu pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Koordinasi dan

Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Monotoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kujungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan, Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, serta Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional yaitu sebesar 100,00%, dan realisasi terendah pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lakologou sebesar 82%.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

- 1. Kesimpulan*
- 2. Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-5 (Lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis satu sasaran, terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kokalukuna tercapai 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan di Kecamatan Kokalukuna termasuk dalam kategori yang cepat berkembang.
2. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dalam masa new normal maka perlu diberdayakan kembali pelaku-pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada di masyarakat antara lain dengan melaksanakan berbagai pelatihan/workshop/pendampingan/*display* hasil UMK, membeli produk-produknya untuk konsumsi rapat/kegiatan dinas, memasukkannya dalam suatu *database*, menghubungkannya dengan para pelaku usaha jasa pariwisata dan seni budaya, menghubungkan dengan LPM Kampus dan menggali kembali potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah serta untuk dikembangkan lebih lanjut.

